

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, Sinar Grafika , Jakarta 2010, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bagir Manan , Ketentuan- Ketentuan Mengenai Peraturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Prespektif UUD 1945 , Jakarta, 1995.

Johan Erwin Isharyanto dan Bagus Sarnawa , 2010, Etika Birokrasi dan Pelayanan Publik , Yogyakarta : LabHukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta

Maria, S.W. Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

North, 1990, dalam Lembaga Administrasi Negara, Standart Pelayanan Publik, Cetakan Pertama , Juli 2009.

Ridwan, H.R . Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Rajagrafindo, 2006)

Sirajudin, dkk. Hukum pelayanan public berbasis partisipasi dan keterbukaan informasi, Setara Press, 2011, Malang.

Soehardjo, Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertin serta Perkembanganya di Indonesia, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro , 2002)

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah ;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu ;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman ;

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24. 7 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas , Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman ;

Peraturan Bupati Sleman Nomor 24. 10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kabupaten Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 33. 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Kabupaten Sleman.